

ABSTRAK

Bonum coniugum dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 (kan. 1055 §1) dipahami sebagai salah satu tujuan hakiki perkawinan, yakni kesejahteraan suami-istri dalam persekutuan hidup dan kasih. Perkawinan sebagai *foedus* antara seorang laki-laki dan perempuan diarahkan bukan hanya pada kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*), tetapi juga pada pertumbuhan personal, spiritual, dan moral kedua mempelai. *Bonum coniugum* berpijak dari realitas yuridis yang berakar pada tindakan kehendak bebas (*consensus*) saling memberikan dan menerima diri secara total.

Dalam praktik kehidupan keluarga Katolik, tidak jarang ditemukan fenomena *simulatio partialis contra bonum coniugum*, yakni tindakan positif kehendak yang menolak kesejahteraan pasangan sebagai tujuan perkawinan. Simulasi ini dapat terwujud dalam bentuk egoisme, manipulasi, dominasi, atau reduksi relasi menjadi sekadar sarana pemuasan diri.

Dari sudut pandang moral Karol Wojtyła dalam *Love and Responsibility*, *bonum coniugum* diperdalam melalui konsep cinta interpersonal sebagai afirmasi pribadi demi dirinya sendiri. Cinta sejati menuntut pemberian diri total (*donatio sui*) dan menolak sikap utilitarian yang memperlakukan pasangan sebagai objek. Oleh karena itu, penolakan terhadap *bonum coniugum* merupakan distorsi antropologis atas makna cinta sebagai *communio personarum*.

Integrasi perspektif yuridis dan moral menunjukkan bahwa *bonum coniugum* bukan hanya tujuan hukum, melainkan dasar ontologis validitas konsensus perkawinan. Ketika unsur ini secara sadar ditolak, perkawinan kehilangan fondasi cinta interpersonal yang sejati dan dapat dinyatakan tidak sah melalui deklarasi nulitas.

Kata Kunci: *bonum coniugum*, *simulatio partialis*, deklarasi nulitas perkawinan, cinta interpersonal, *communio personarum*

ABSTRACT

Bonum coniugum in the 1983 Code of Canon Law (can. 1055 §1) is understood as one of the essential ends of marriage, namely the good and well-being of the spouses within a partnership of the whole of life and love. Marriage as a *foedus* between a man and a woman is ordered not only to the procreation and education of offspring (*bonum prolis*), but also to the personal, spiritual, and moral growth of both spouses. Thus, *bonum coniugum* constitutes a juridical reality rooted in the free act of will (*consensus*), by which the spouses mutually give and accept one another in total self-giving.

In the lived reality of Catholic families, however, cases of *simulatio partialis contra bonum coniugum* are not uncommon. This refers to a positive act of the will excluding the good of the spouse as an essential end of marriage. Such simulation may manifest itself in egoism, manipulation, domination, or the reduction of marital relationship to a means of self-gratification.

From the moral perspective of Karol Wojtyła in *Love and Responsibility*, *bonum coniugum* is deepened through the concept of interpersonal love as the affirmation of the person for his or her own sake. Authentic love requires total self-gift (*donatio sui*) and rejects any utilitarian attitude that treats the spouse as an object. Therefore, the exclusion of *bonum coniugum* represents an anthropological distortion of marriage as a *communio personarum*.

The integration of juridical and moral perspectives demonstrates that *bonum coniugum* is not merely a legal end but the ontological foundation of valid matrimonial consent. When consciously excluded, marriage lacks the true foundation of interpersonal love and may therefore be declared null.

Keywords: *bonum coniugum*, partial simulation, declaration of nullity, interpersonal love, *communio personarum*.